LAPORAN KINERJA

Triwulan I_2025

Disusun Oleh

TIM KINERJA BPBL AMBON

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kerjasama dari semua pihak yang terkait lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 Triwulan I Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2025 yang tertuang dalam pelaksanaan program kerja sebagai upaya pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Laporan ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kegiatan lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon melalui program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 oleh setiap bagian di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Laporan kinerja ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Ambon, 16 April 2025
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

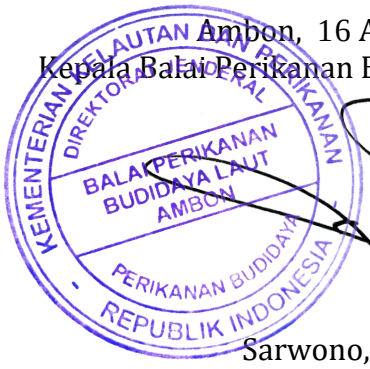

Sarwono, S.St.Pi

Daftar ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Gambar v
Daftar Grafik vi
Daftar Tabel vii
Ringkasan Eksekutif 1
I. Pendahuluan 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Maksud dan Tujuan 5
1.3. Tugas dan Fungsi 5
1.4. Sumberdaya Manusia 8
1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja 9
1.6. Sistematika Penyajian Laporan 11
II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja 13
2.1 Visi Presiden 14
2.2 Misi Presiden 14
2.3 Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon 15
2.4 Penetapan Kinerja 18
2.5 Pengukuran Kinerja 22
III. Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan 25
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 27
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja 27
3.2.1. Sasaran kegiatan I, Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar 27
3.2.2. Sasaran Kegiatan II, Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut 28
3.2.3. Sasaran Kegiatan III, Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut 41
3.2.4. Sasaran kegiatan IV, Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik 45
3.3. Akuntabilitas Keuangan 68
3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran 71

3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran 72
IV. Penutup 73
4.1. Simpulan 73
4.2. Permasalahan/Kendala yang dihadapi 73
4.3. Langkah Perbaikan 74
V. Lampiran 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Ambon Tahun 2025 6
Gambar 2. Capaian Kinerja IKU BPBL Ambon Triwulan I tahun 2025 23
Gambar 3. Calon induk Ikan Clownfish 30
Gambar 4. Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih Ikan 34
Gambar 5. Pemeriksaan Sampel Laboratorium Keskanling BPBL Ambon 37
Gambar 6. Produksi Planlet Rumput Laut 44
Gambar 7. Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN 49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2025 8

Grafik 2. Pendidikan Pegawai (PNS dan PPPK) Lingkup BPBL Ambon 2025 8

Grafik 3. Golongan Pegawai (PNS) Lingkup BPBL Ambon 2025 9

Grafik 4. Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut 29

Grafik 5. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut 32

Grafik 6. Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut 36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon 15

Tabel 2. Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2025 17

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan Pertama Tahun 2025 25

Tabel 4. Capaian IKU Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit) 27

Tabel 5. Capaian IKU Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor) 28

Tabel 6. Rincian Produksi Calon Induk Unggul Triwulan I 29

Tabel 7. Capaian IKU Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor) 31

Tabel 8. Capaian IKU Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel) 36

Tabel 9. Capaian IKU Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel) 38

Tabel 10. Capaian IKU Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang) 41

Tabel 11. Capaian IKU Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit) 42

Tabel 12. Capaian IKU Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg) 44

Tabel 13. Capaian IKU Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) 46

Tabel 14. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks) 48

Tabel 15. Capaian IKU Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen) 52

Tabel 16. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen) 53

Tabel 17. Capaian IKU Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai) 55

Tabel 18. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai) 56

Tabel 19. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai) 58

Tabel 20. Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks) 57
Tabel 21. Deskripsi Tone Berita 60
Tabel 22. Capaian IKU "Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen 61
Tabel 23. Deskripsi Jenis Informasi Publik 62
Tabel 24. Capaian IKU "Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai) 63
Tabel 25. Capaian IKU "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai) 65
Tabel 26. Capaian IKU "Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen) 67
Tabel 27. Capaian IKU Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen) 68
Tabel 28. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja Tahun 2025 dan 2024 69
Tabel 29. Data realisasi anggaran pada Indkator Kinerja Utama (IKU) program prioritas Triwulan I tahun 2025 69

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (BPBL Ambon) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan perairan disekitarnya. Lingkup wilayah kerja BPBL Ambon meliputi wilayah Maluku, Sulawesi, Papua dan Papua Barat. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas yakni mencakup Indonesia bagian timur, secara langsung berdampak pada besarnya tanggung jawab yang diemban dengan tugas pokok dalam hal budidaya laut dimana BPBL Ambon dituntut mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di bidang perikanan budidaya laut guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan kegiatan budidaya laut di wilayah kerja melalui peningkatan kinerja dan kebijakan program yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2025 ini merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BPBL Ambon. Laporan Kinerja adalah dokumen evaluasi untuk mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBL Ambon dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Pada tahun 2025, BPBL Ambon menetapkan 4 sasaran kegiatan dan 21 indikator kinerja utama. Masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi balai. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budiddaya Laut Ambon pada tahun 2025, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 24.830.270.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang tertuang dalam DIPA Nomor: SP DIPA-032.04.2.567720/2025 tanggal 02 Desember 2024. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Maret tahun 2025 sebesar Rp. 4.277.949.159 (Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima

Puluh Sembilan Rupiah) atau 17,23% dari total pagu anggaran. Proses pencapaian Indikator kinerja utama pada tahun 2024 IKU utama telah dicapai dan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah penjabaran persentase capaian IKU sampai dengan September tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
2. Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor) tercapai 50 ekor di akhir triwulan pertama;
3. Benih Ikan AIr Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor) tercapai 96.000 ekor di akhir triwulan pertama;
4. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel) tercapai 275 sampel di akhir triwulan pertama;
5. Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel) tercapai 9 sampel di akhir triwulan pertama;
6. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
7. Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester pertama dan kedua;
8. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg), tercapai 500 kg diakhir triwulan pertama;
9. Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
10. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester pertama;
11. Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen) tercapai 92,86% di akhir triwulan pertama;

13. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester pertama dan kedua;
15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester pertama dsan kedua;
16. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
17. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen) tercapai 100% pada akhir triwulan pertama;
18. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun.;
20. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen) perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
21. Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen) perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun.

Beberapa Indikator Kinerja Utama lingkup BPBL Ambon pada tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyusunan perencanaan dan kesesuaian pelaksanaan teknis di lapangan sehingga proses ketercapaian kinerja 2025 dapat dilaksanakan dengan baik.

Tindak lanjut penerapan rekomendasi adalah penyusunan target perencanaan kinerja di 2025 harus disusun sebaik mungkin dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis dimulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan prioritas yang sesuai dengan tusi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPN Tahun 2025-2045, telah mengamanatkan agar melakukan pembangunan berbagai bidang secara berkelanjutan. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu di dqhm RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I merupakan penguatan transformasi yang meliputi (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; (iii) Transformasi Tata Kelola; (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (vi) Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana; dan (vii) Kesinambungan Pembangunan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, RKP Tahun 2025 berpedoman pada 8 Sasaran Pembangunan dan 5 Agenda Pembangunan. Selaras dengan RKP, pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan 5 arah kebijakan berbasis Ekonomi Biru yaitu Penambahan kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Pembersihan sampai plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dengan masing-masing IKU seperti yang tercantum pada Renstra dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja antara lain :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kepada seluruh *stakeholders;*
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Perikanan Budididaya Laut Ambon pada tahun anggaran 2025 dalam upaya perbaikan kinerja atas tahun sebelumnya; dan sebagai bahan inputan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 6/PERMEN-KP/2014 yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. Pelaksanaan sertifikasi system perikanan budidaya laut;
5. Pelaksanaan kerjasama teknis budidaya laut;

6. Pengelolaan dan pelayanan system informasi dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menjadi Eselon IIIa dengan struktur organisasi terdiri atas:

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, tersaji pada gambar dibawah ini :

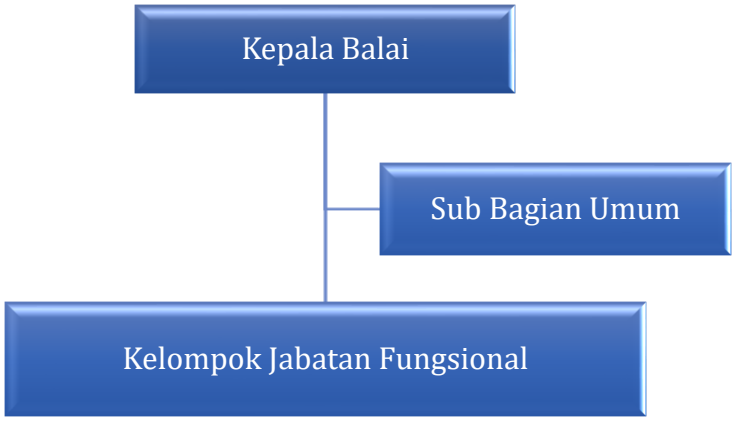

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Ambon Tahun 2025

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 1 Kasubag Umum, dan seluruh pegawai yang berjumlah 87 orang dengan kompetensi yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan tercapainya kinerja yang akuntabel.

Adapun tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi BPBL Ambon adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2. Kelompok Kerja

Tim Kelompok Kerja merupakan tim mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai IKU yang satker. Tim kerja terdiri dari pejabat fungsional umum dan tertertu yang menjalankan kegiatan kerekayasaan, pengujian, pendampingan, penerapan standar/sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan benih/budidaya serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat fungsional tertentu di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon terdiri dari : Analis Akuakultur, Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengelola Kesehatan Ikan, Statistisi, dan Pranata Humas.

Selain 2 bagian utama yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan SK Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon No. 05/Kpts/BPBLA/OT.210/I/2022 tentang Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 2022 terdiri dari 4 divisi yakni:

1. Divisi Produksi Benih Ikan Konsumsi
2. Divisi Produksi Calon Induk dan Rumput Laut
3. Divisi Produksi Benih Ikan Hias Laut
4. Divisi Pengelolaan Laboratorium

1.4. Sumberdaya Manusia

Jumlah Pegawai BPBL Ambon pada tahun 2025 terdiri dari 58 orang ASN (PNS dan PPPK), 23 orang tenaga kontrak dan 6 orang PJLP yang diuraikan sebagai berikut :

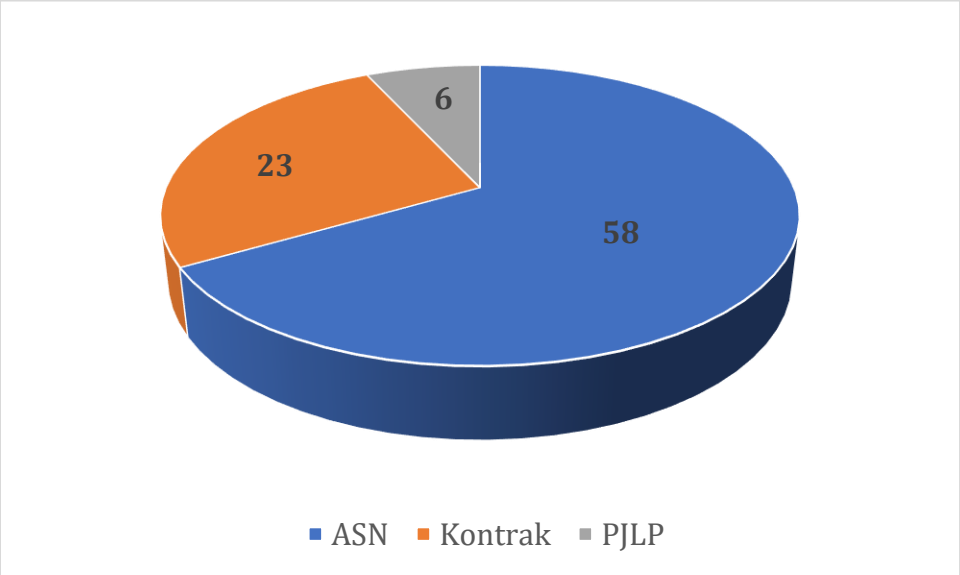

Grafik 1. Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2025

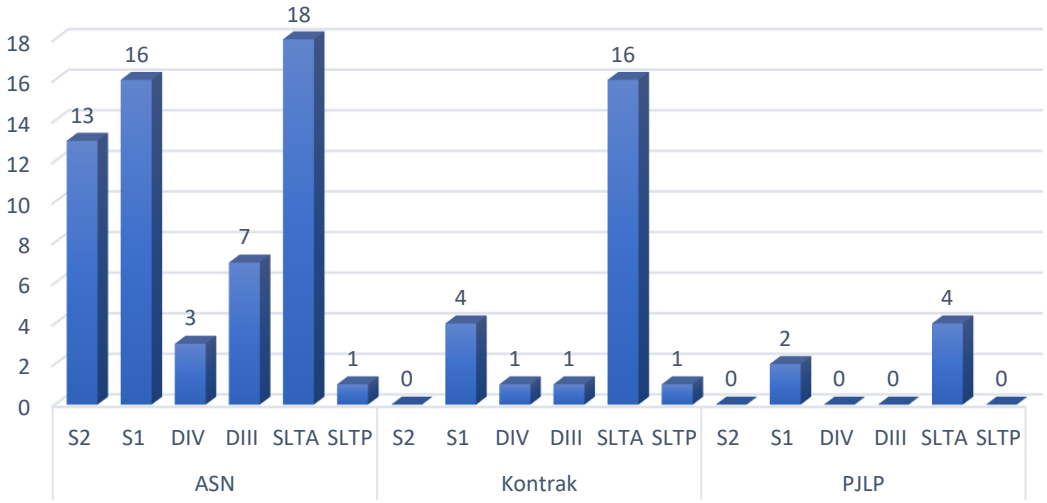

Grafik 2. Pendidikan Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2025

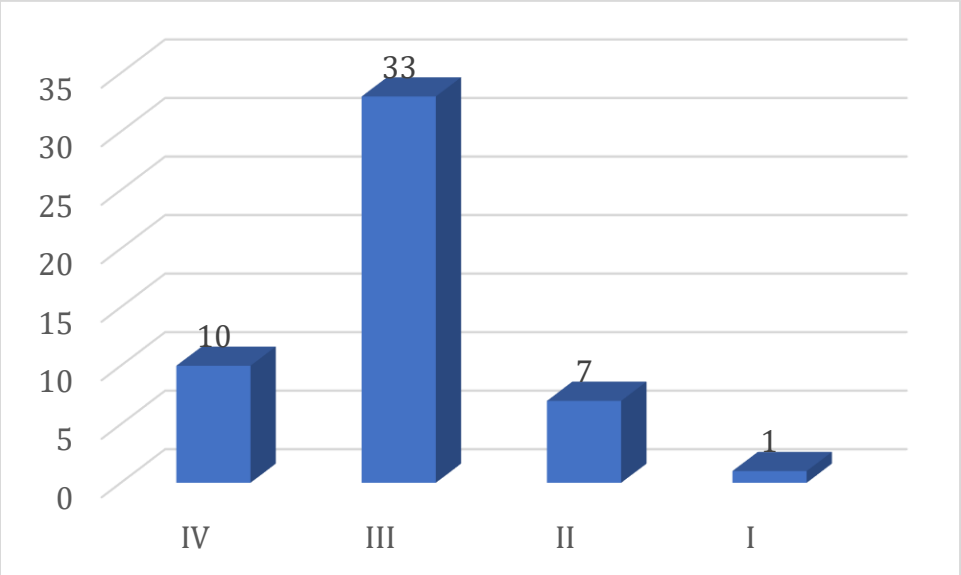

Grafik 3. Golongan Pegawai (PNS) Lingkup BPBL Ambon 2025

1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja

Pengembangan budidaya laut atau dikenal dengan Marikultur terus dikembangkan. Didukung dengan potensi yang cukup besar, marikultur juga dinilai akan dapat berkontribusi banyak untuk mendorong Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Secara umum Tahun 2024, total produksi ikan hasil budi daya mencapai 6,37 juta ton, meningkat 13,64% dari tahun sebelumnya. Sedangkan produksi rumput laut mencapai 10,80 juta ton, meningkat sebesar 10,82% dari tahun sebelumnya. Kenaikan produksi tersebut diikuti tren positif peningkatan nilai rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Nilai rata-rata pendapatan pembudidaya mencapai Rp 5.136.547 atau meningkat sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya. KKP akan mendukung pengembangan budidaya tuna oleh investor di perairan Biak, Papua. Pengembangan budidaya dapat meningkatkan produksi tuna Indonesia yang saat ini sudah menyumbang 18 % dari produksi tuna global yang mencapai 8,27 juta ton. Dengan adanya tuna farming yang akan dilakukan olah pelaku usaha maka akan mengurangi tekanan penangkapan tuna yang pada akhirnya akan menjaga kelestarian sumber daya tuna di masa mendatang.

Pengembangan kegiatan marikultur di wilayah kerja juga terus dilakukan guna mendukung peningkatan nilai produksi nasional khususnya produksi komoditas unggulan laut yang dikembangkan sampai saat ini.

Maluku menjadi salah satu provinsi kepulauan dengan potensi laut yang cukup besar, data menunjukan potensi laut Maluku dapat mencapai 3,9 Juta ton dengan estimasi nilai perolehan sekitar Rp. 117 Triliun. Dengan kekayaan laut yang melimpah, sektor perikanan laut berpeluang besar dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam hal pengembangan budidaya laut di Maluku memiliki beberapa komoditas unggulan. Komoditas unggulan yang dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis penting antara lain beberapa jenis ikan kerapu, ikan kakap putih, dan ikan bubara atau Ikan Kuwe. Selain ikan konsumsi, ikan hias juga menjadi sektor andalan pengembangan budidaya. Ikan clownfish atau ikan badut atau banyak dikenal ikan nemo telah menjadi salah satu primadona komoditas ikan hias laut yang dibudidayakan. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon saat ini telah mampu mengembangkan teknologi budidaya ikan hias clownfish dengan melakukan hybridisasi induk sehingga diperoleh varian yang beraneka ragam corak dan warna, tercatat lebih dari 50 varian clownfish yang telah dihasilkan dan memiliki nilai jual tinggi dipasaran.

Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga tengah fokus dalam mengembangan komoditas unggulan rumput laut. Budidaya rumput laut menggunakan teknik kultur jaringan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan produksi rumput laut di Indonesia. Teknik ini telah diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tujuan untuk menggenjot produksi rumput laut dan memperbaiki kualitas bibit rumput laut yang ada di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan produksi rumput laut, KKP juga telah membangun kawasan-kawasan sentra budidaya rumput laut di beberapa daerah seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Kawasan-kawasan ini sepenuhnya menggunakan bibit rumput laut hasil dari kultur jaringan.

Bibit rumput laut hasil kultur jaringan juga telah disalurkan kepada kelompok pembudidaya dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil produksi rumput laut secara keseluruhan. Dengan penerapan teknik kultur jaringan, diharapkan produksi rumput laut di Indonesia dapat terus meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai produsen rumput laut nomor satu di dunia.

Beberapa isu dan permasalahan dalam pengembangan budidaya laut di wilayah timur Indonesia antara lain:

1. Penyediaan, distribusi induk dan benih berkualitas masih terbatas;
2. Mahalnya biaya pakan dalam budidaya;
3. Ancaman infeksi penyakit;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan budidaya sehingga berdampak rendahnya nilai produksi
5. Implementasi konsep biosecurity yang belum memadai sehingga intensitas infeksi penyakit pada ikan budidaya masih terus terjadi;
6. Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya di wilayah kerja
7. Masih rendahnya akses pasar yang menunjang pemasaran produk budidaya, dan
8. Akses permodalan bagi pembudidaya masih rendah

1.6. Sistematika Penyajian Laporan kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini disajikan ringkasan mengenai tujuan, sasaran, capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta antisipasi untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi dari Balai Perikanan Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan Laporan kinerja.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Balai Perikanan

Budidaya Laut Ambon pada tahun 2020-2024. Rencana kinerja tahun 2024 dan indikator keberhasilan pencapaian penetapan kinerja berupa target program prioritas.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, pada bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK), evaluasi dan analisis capaian kinerja termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target serta hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan di tahun sebelumnya. Serta akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.

Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala serta upaya tindak lanjut untuk perbaikan tahun mendatang.

Lampiran, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.1. Visi Presiden

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Visi KKP adalah "Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong"

2.2. Misi Presiden

Visi di atas dapat diwujudkan dengan pelaksanaan Misi Presiden dalam Asta Cita, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon bertanggung jawab untuk membantu dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan budidaya laut di lingkup wilayah kerjanya adapun visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh BPBL Ambon sejalan dengan visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya. Penerapan dan pelaksanaan visi misi dilakukan secara bertanggungjawab didasari sikap gotong royong, yang saling mendukung memberi manfaat dan memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi bagi kepentingan stakeholder perikanan budidaya.

2.3. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

Mengacu pada sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya 2025 – 2029 sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan ditetapkan melalui tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang terbagi menjadi empat perspektif dalam bentuk peta sasaran strategis BPBL Ambon.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
• Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	• Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)
• Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	• Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor) • Benih Ikan AIr Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor) • Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)

	• Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel) • Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)
• Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	• Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit) • Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)
• Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik	• Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) • Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks) • Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen) • Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen) • Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai) • Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai) • Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai) • Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)

	• Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen) • Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai) • Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai) • Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen) • Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)

2.3.1. Dukungan Anggaran

Dalam mendukung terlaksananya perencanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 24.830.270.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Berikut adalah komposisi penganggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2025:

Tabel 2. Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2025

NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	4.668.680.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	3.363.744.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	2.365.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	14.432.846.000
Total Anggaran BPBL Ambon Tahun 2025		**24.830.270.000**

2.4. Penetapan Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2025, adalah sebagai berikut:

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Tb. Haeru Rahayu	**Sarwono**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	11
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	2.	Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	1.142
		3.	Benih Ikan Alr Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	423.586
		4.	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	309
		5.	Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17
		6.	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	400
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	7.	Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	72
		8.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	10.124
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	9.	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81
		11.	Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)	100
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	85
		13.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	76
		14.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92
		15.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	71,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		16.	Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	3
		17.	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)	≥86
		18.	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	≥80
		19.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	70
		20.	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	80
		21.	Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)	65

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Tb. Haeru Rahayu	**Sarwono**

DATA ANGGARAN :

No.	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Laut	3.363.774.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	4.668.680.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Tawar	2.365.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	14.432.846.000
	Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2025	**24.830.270.000**

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	Pihak Pertama Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Tb. Haeru Rahayu	**Sarwono**

2.5. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, BPBL Ambon menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim *Strategic Management Office* (Tim Pengelola Kinerja BPBL Ambon) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat;
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.
3. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian rata-rata indicator kinerja utama dan IKM pada tahun 2025 di triwulan pertama adalah sebesar 109,82 yang termasuk kategori Baik. Berikut adalah hasil tangkap layer capaian kinerja BPBL Ambon tahun Triwulan I tahun 2025.

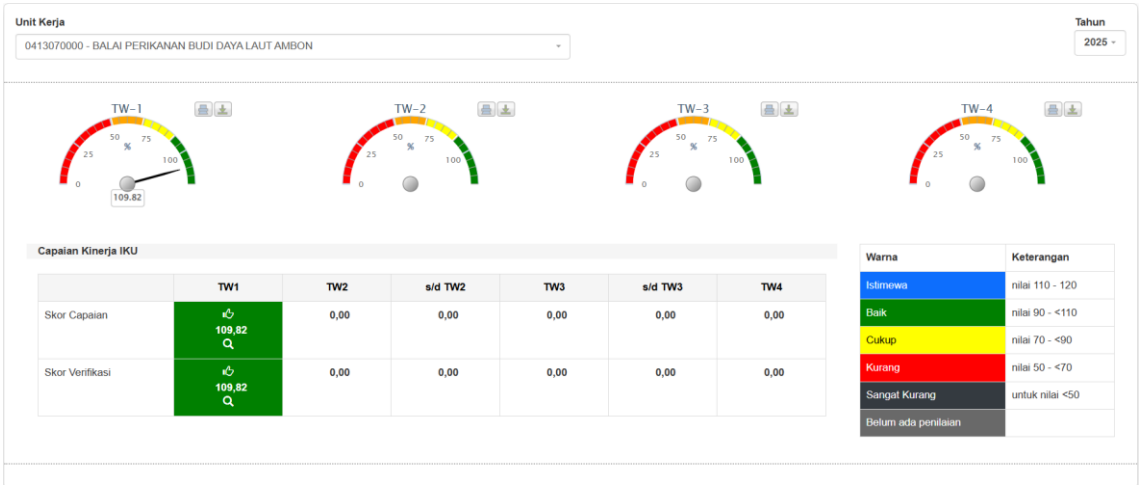

Gambar 2. Capaian Kinerja IKU BPBL Ambon Triwulan I tahun 2025

Polarisasi data menunjukkan ekspektasi (harapan) arah nilai aktual/realisasi dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target.

1. ***Maximize***: Semakin tinggi nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.

Contoh polarisasi data *maximize*.

2. ***Minimize***: Semakin rendah nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.

Contoh polarisasi data *minimize*.

3. ***Stabilize***: Capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual/realisasi IKU mendekati target dalam suatu rentang tertentu.

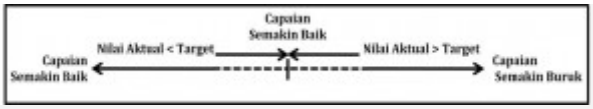

Contoh polarisasi data *stabilize*.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran capaian IKU, bab ini menguraikan tentang indikator kinerja kegiatan, penjelasan tentang capaiannya, kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya termasuk langkah antisipasi yang dilakukan pada tahun berjalan.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	11 unit	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	1.142 ekor	30 ekor	50 ekor	Capain IKU ini mencapai 120% pada TW I
		Benih Ikan AIr Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	423.586 ekor	89.000 ekor	96.000 ekor	Capaian IKU ini mencapai 107,87% pada TW I
		Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	309 sampel	73 sampel	275 sampel	Capaian IKU ini mencapai 120% pada TW I
		Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17 sampel	4 sampel	9 sampel	Capaian IKU ini mencapai 120% pada TW I
		Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	400 orang	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	72 unit	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	10.124 kg	500 kg	500 kg	Capaian IKU ini mencapai 100% pada TW I

4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81	-	-	Pengukuran dilakukan pada tiap akhir semester
		Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)	100%	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	85%	85%	92,86%	Capaian IKU ini 109,25% pada TW I
		Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	76	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92	-	-	Pengukuran dilakukan pada tiap akhir semester
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	71,5	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	3	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)	≥86%	86%	100%	Capaian IKU ini mencapai 116,28% pada TW I
		Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	≥80	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun tahunan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	70%	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	80%	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)	65%	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Bagian berikut menguraikan tentang evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan dan analisis capaian kinerja dari sasaran kegiatan.

SASARAN KEGIATAN I : TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR

IKU 1 : Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)

Perikanan Budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan meningkatnya fenomena kenaikan kebutuhan pangan masyarakat yang aman dikonsumsi serta upaya dalam peningkatan gizi masyarakat. Usaha budidaya ikan air tawar memiliki prospek yang menjanjikan, komoditas ini mudah untuk dibudidayakan dan termasuk komoditas yang diminati oleh pasar. Dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 386 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Dan Prasarana Budi Daya Ikan Lele Atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2024, pada tahun 2025 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kembali mendapat tugas untuk mendistribusikan bantuan sarana produksi ikan sistem bioflok sebanyak 11 unit yang tersebar di beberapa provinsi di wilayah kerja.

Tabel 4. Capaian IKU "Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)"

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar						
Nama Indikator : Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)	Target	Realisasi	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	11	0	0	0%

Capaian IKU ini di triwulan pertama yang masih rendah, namun nilainya relatif sama dengan capaian pada trwulan pertama tahun lalu. Rendahnya nilai capaian dikarenakan belum adanya rekomendasi Usulan Calon Penerima Calon

Lokasi dari anggota dewan DPR RI yang dapilnya berada di wilayah kerja BPBL Ambon dan adanya efisiensi anggaran. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya percepatan realisasi bantuan sarana budidaya ikan system bioflok antara lain melalui koordinasi intensif dengan pihak anggota dewan, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi calon penerima bantuan pemerintah dalam pemenuhan persyaratan adiministrasi dan teknis sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

Perhitungan capaian kegiatan dilaksanakan di akhir tahun dengan melihat jumlah sarana yang telah disalurkan ke masyarakat dengan memenuhi ketentuan petunjuk teknis yang berlaku.

SASARAN KEGIATAN II : TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT

IKU 2 : Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)

Produksi calon induk ikan adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Produksi calon induk ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat menghasilkan benih bermutu bagi kegiatan budidaya ikan di BPBL Ambon.

Tabel 5. Capaian IKU "Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)"

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)	Target	Realisasi	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
30	50	120	1.142	50	4,38	100%

Pada tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon juga ditargetkan memproduksi induk/calon induk unggul sebanyak 1.142 ekor. Sampai akhir triwulan pertama 2025 capaian produksi calon induk teralisasi 50 ekor atau sebesar 102.47% dari target triwulan I. Produksi calon Komoditas induk yang diproduksi

oleh BPBL Ambon meliputi jenis ikan konsumsi dan ikan hias. Produksi induk unggul ikan konsumsi yaitu kakap putih dan bubara. Sedangkan produksi induk unggul ikan hias yaitu ikan hias *clownfish* dengan berbagai varian.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan bulan Maret 2025 terealisasi sebesar Rp. 305,968,000 dari pagu anggaran senilai Rp. 305,968,000 atau sebesar 100 %.

Berikut adalah rincian produksi calon induk yang dihasilkan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun pada triwulan pertama 2025, dapat dilihat pada tabel 21 berikut:

Tabel 6. Rincian Produksi Calon Induk Unggul Triwulan I

No.	Komoditas	Jumlah Komoditas
1.	Kakap Putih	-
2.	Clownfish	50 Ekor dengan ukuran minimal 4 cm.
3.	Kuwe,	-
4.	Kerapu	-

Grafik 4. Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Produksi calon induk ikan pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada tahun 2025 berbeda beda, produksi calon induk ikan pada triwulan pertama tahun 2025 tertinggi dihasilkan oleh BPBL

Batam dengan jumlah 2040 Ekor. Sementara itu BPBL Ambon mampu memproduksi sebanyak 50 Ekor calon induk dan BBPBL Lampung dan BPBL Lombok belum ada produksi. Data tersebut menunjukan setiap satker telah melaksanakan produksi calon induk berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan tata kelola budidaya yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu perbedaan jenis komoditas budidaya yang dikembangkan berpengaruh pada jumlah calin yang diproduksi karena setiap komoditas memiliki karakteristik tersendiri seperti tingkat pertumbuhan, respon terhadap pakan hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.

Gambar 3. Calon induk Ikan Clownfish

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi calon induk antara lain melalui peningkatan jumlah produksi benih yang diseleksi secara ketat sehingga menghasilkan benih ikan unggul yang siap dibesarkan menjadi calon induk. Telah dilakukan grading secara teratur guna menekan tingkat kanibalisme ikan selama proses pemeliharaan. Mengatur pola pakan yang tepat (mencukupi) dengan melakukan pemberian pakan dengan jenis pakan buatan (pabrikan) dan pakan segar (ikan rucah) yang relative lebih murah.

Rencana aksi untuk periode mendatang adalah pemeliharaan dan peningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan produksi calon induk sehingga produksi dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi calon induk yang berkualitas, dan mampu menghasilkan benih ikan yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menghadapi perubahan musim/cuaca pada beberapa

bulan ke depan, perlu adanya upaya antisipasi agar tidak terjadi kematian massal pada calon induk yang diperlihara dan menjalankan SOP pemeliharaan calon induk dengan baik dan benar.

IKU 3 : Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)

Target jumlah bantuan benih yang harus disalurkan oleh BPBL Ambon tahun 2025 sebesar 423.586 ekor. Dimana Perhitungan pencapaian target IKU bantuan benih dilakukan per triwulan dalam aplikasi kinerjaku, benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat berupa jenis ikan konsumsi dan ikan hias laut. Pagu anggaran IKU Bantuan Benih Ikan Laut Rp. 1.329.391.000,-. Secara rill progress capaian Bantuan Benih sampai dengan bulan Maret 2025 ini adalah sebesar 96.000 ekor dari perencanaan target triwulan yang telah ditetapkan sebesar 89.000 ekor. Bantuan Benih yang disalurkan pada triwulan pertama terdiri atas benih ikan konsumsi yang didominasi benih ikan kakap putih.

Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan pertama TA. 2025 terealisasi sebesar Rp. 705.186.204 atau sebesar 53,05% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Tabel 7. Capaian IKU "Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)"

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)	Target	Realisasi	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
89.000	92.000	107,87	423.586	92.000	21,72	89,89%

Data Penerima Bantuan benih telah diproses penginputan dalam aplikasi Bantuan Pemerintah KKP, Realisasi Bantuan Benih pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah direncanakan, hal ini disebabkan jumlah produksi benih cukup baik, untuk beberapa komoditas unggulan seperti kakap putih dan ikan hias laut. Bantuan benih diberikan kepada pembudidaya yang ada di Propinsi Maluku yaitu di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

Grafik 5. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan benih ikan laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada triwulan pertama tahun 2025, secara umum 4 satker laut telah melakukan proses pencapaian IKU. Perbedaan nilai realisasi bantuan benih ikan laut hal ini tentunya disebabkan perbedaan komoditas yang dikembangkan dan didistribusikan kepada masyarakat. Setiap Balai memiliki komoditas unggulan tertentu misalnya Lampung dengan cobia, Batam dengan bawal bintang, Lombok dengan kakap putih nya. Pencapaian tertinggi ada di BBPBL Lampung yang dikuti oleh Ambon Batam, dan Lombok.

Secara khusus Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menguasai teknologi budidaya kakap putih dan bubara (Kuwe) serat ikan hias clownfish yang mencapai 50 varian. Perbedaan tata Kelola komoditas akan berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai produksi benih ikan. Selain itu dalam realisasi bantuan benih juga dipengaruhi faktor non teknis seperti kelengkapan administrasi usulan permohonan bantuan dari pokdakan yang kurang lengkap atau jarak lokasi balai dan lokasi calon penerima bantuan yang terlalu jauh/akses transportasi sulit atau biaya operasional pengangkutan yang terlalu tinggi.

Pada proses produksi benih ikan konsumsi, Selain faktor lingkungan, adanya serangan pathogen juga menyebabkan masalah pada produksi benih. Pada benih kakap putih dan bubara juga ditemukan infeksi *Trichodina*. Trichodina sp. merupakan ektoparasit pada ikan air tawar maupun ikan laut. Hampir semua spesies ikan dapat terserang Trichodina sp. (Durborow 2003). Inang yang paling sering terserang Trichodina sp. biasanya berasal dari famili Cyprinidae (Afifah et al. 2014). Trichodina sp. akan mudah menginfeksi ikan jika kepadatan penebaran tinggi dan tingkat pemberian pakan yang tinggi serta kualitas air yang rendah (Durborow 2003). Predileksi Trichodina sp. adalah permukaan tubuh, sirip dan insang (Afifah et al. 2014). Karakter morfologi, identifikasi Trichodina sp. meliputi ukuran diameter tubuh, diameter cincin dentikel, diameter adhesive disc, lebar membran dan karakter meristik yaitu jumlah dentikel (Dana et al. 2002; Anisah et al. 2016).

Zheila (2013), permukaan tubuh berhubungan langsung dengan lingkungan yang memudahkan serangan Trichodina sp., selain itu permukaan tubuh juga menjadi tempat hidup yang baik bagi ektoparasit (Zheila 2013). Menurut Pramono dan Syakuri (2008), Trichodina sp. menempel pada permukaan tubuh dan akan berputar 360o dengan menggunakan silia sehingga akan merusak sel-sel disekitar dan memakan sel RIWIDIHARSO et al. – Trichodina pada benih ikan nilem di Balai Benih Ikan Kutasari Purbalingga 323 epitel yang hancur hingga mengakibatkan iritasi pada permukaan tubuh. Tingginya kandungan bahan organik dalam kolam dapat menyebabkan tingginya jumlah patogen sehingga kulit akan mensekresi mucus yang berlebih sebagai antibodi untuk mendegradasi patogen. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kulit sehingga lebih mudah terinfeksi ektoparasit. Serangan Trichodina sp. dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan hyperplasia pada permukaan tubuh dan insang (Afifah et al. 2014). Serangan parasit ini menyebabkan hyperplasia yang dapat menyebabkan gangguan osmotik, pernapasan bahkan menyebabkan kematian. Kondisi ini mengakibatkan terhalangnya aliran air menuju filamen insang sehingga dapat menyebabkan ikan stres dan sulit untuk bernapas (Afifah et al. 2014).

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi dan penjaminan kualitas benih yang dihasilkan antara lain melalui

menjalankan SOP kegiatan dengan baik dan penerapan *biosecurity* di lingkungan hatchery secara optimal, melakukan manajemen pemberian pakan benih yang tepat, pakan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik, terutama dalam kandungan nutrisi pakan yang terkandung didalamnya. Pakan induk dan benih tepat secara ukuran, jumlah, frekuensi pemberian sehingga berdampak pada peningkatan survival rate induk dan benih, dan secara umum optimalkan implementasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di instalasi produksi budidaya. Selain itu pengoptimalan pengelolaan kualitas air dengan menjaga perputaran media pemeliharaan menjadi bagian penting dalam penanganan penyakit ikan.

Rencana aksi dalam manajemen kesehatan ikan, khususnya penanganan infeksi *Trichodina* dapat dilakukan dengan perendaman ikan dengan menggunakan fumisid 5-10 ppm selama 30 menit dan diulang jika masih terjadi infeksi. Selain itu dilakukan penambahan vitamin C dalam pakan yang diberikan sampai ikan terlihat sehat, vitamin C secara umum dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh terhadap serangan penyakit.

Gambar 4. Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih Ikan

IKU 4 : Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)

Salah satu faktor penyebab gagalnya usaha budidaya ikan adalah terjadinya kejadian penyakit pada ikan budidaya, penyakit ikan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar dengan mortalitas tinggi. Penyakit ikan adalah segala bentuk penyimpangan yang dapat menyebabkan ikan merasa terganggu kehidupanya. Atau dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik, kimia, biologis, morfologi dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal yang disebabkan factor internal atau eksternal.

Penyebab penyakit dapat berasal dari dalam tubuh ikan maupun luar. Faktor internal antara lain akibat keturunan (genetic), seksresi internal, imunodefisiensi, kelainan saraf atau gangguan metabolik. Sedangkan faktor eksternal antara lain: serangan pathogen, hama, lingkungan atau malnutrisi.

Upaya pengendalian hama dan penyakit ikan yang biasa dilakukan oleh pembudidaya adalah upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif adalah tindakan yang sebaiknya dilakukan pembudidaya untuk mengatasi serangan penyakit. Upaya kuratif atau pengobatan adalah upaya yang dilakukan pembudidaya untuk mengatasi penyakit ikan dengan menggunakan obat baik yang bersifat alami maupun sintetis. Pengobatan diberikan berdasarkan jenis penyakit, pathogen dan dosis tertentu.

Sampel uji berupa sampel ikan dan sampel air baik internal maupun eksternal. Kondisi sampel ikan harus masih segar, baru mati, atau masih hidup dan belum busuk. Sampel uji internal diperoleh dari sampel ikan dari unit-unit produksi internal melalui pengambilan sampel aktif secara purposive (ditentukan) yaitu ikan yang diduga terkena infeksi pathogen. Sementara sampel eksternal diperoleh dari pihak luar yang memasukkan sampelnya untuk diuji.

Hingga akhir triwulan pertama tahun 2025, capaian kinerja pada IKU pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan mampu melebihi target yang ditetapkan. Capaian realisasi terhadap jumlah sampel yang di uji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon mencapai 275 sampel dari target triwulan pertama sebesar 73 sampel. 275 sampel tersebut terdiri dari 72

sampel untuk pengujian kualitas air, 195 sampel untuk pengujian mikrobiologi dan 8 sampel untuk pengujian biomolekuler.

Tabel 8. Capaian IKU "Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)"

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
73	275	120	309	275	89%	100%

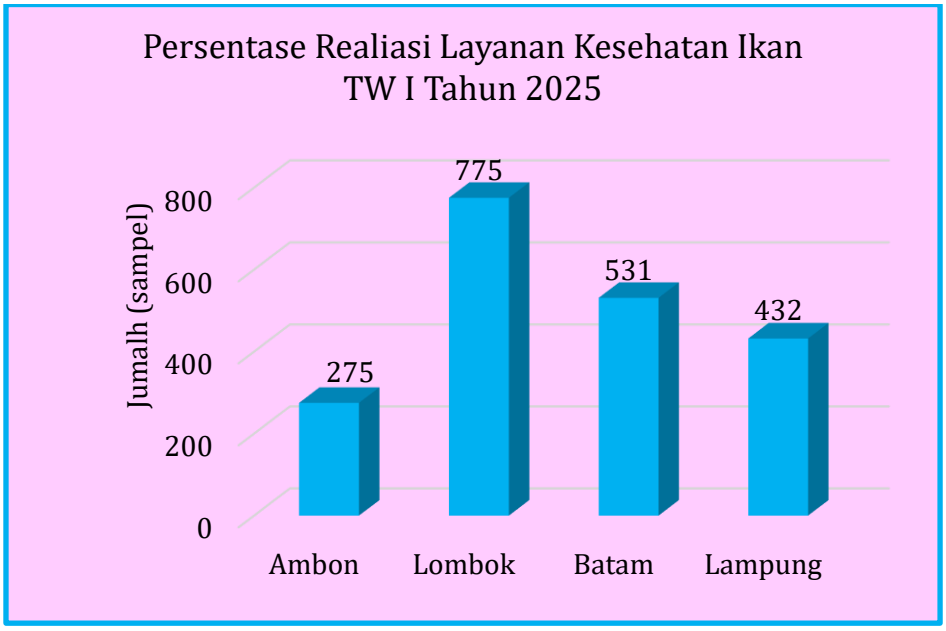

Grafik 6. Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut

Dari jumlah sampel yang diuji, sampel ikan hias merupakan sampel dengan infestasi mikro-parasit tertinggi dibandingkan sampel benih ikan konsumsi. Infestasi parasite pada ikan hias nemo didominasi oleh *Pseudorhabdosynocus* sp. sedangkan pada ikan konsumsi didominasi oleh *Trichodina* sp. Selain cacing *Pseudorhabdosynocus* sp., infestasi parasite pada ikan nemo juga ditemukan cacing *Haliotrema* sp, dan siliata *Amyloodinium*, *Uronema* dan *Cryptocaryon*. Organ yang terserang adalah insang, sehingga hasil pengamatan menunjukkan adanya

abnormal pada struktur insang berupa hyperplasia, edema, nekrosis, maupun kongesti. Kondisi abnormal pada struktur insang menyebabkan kesulitan dalam penyerapan oksigen dengan optimal.

Hasil pengujian mikro-bakteri pada sampel menunjukkan adanya infeksi vibriosis. Spesies Vibrio yang patogen mampu menimbulkan penyakit epizootic yang serius, namun beberapa spesies yang lain hanya bersifat patogen oportunistik yang menyebabkan penyakit apabila ikan mengalami luka fisik, luka akibat parasit, dan stress. Menyukai lokasi pesisir untuk berkembang karena pengaruh bahan organic yang melimpah di area pesisir. Semakin tinggi nilai TOM maka semakin tinggi kelimpahan bakteri Vibrio di perairan. Selain itu suhu perairan yang hangat juga memicu kelimpahan bakteri di perairan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kualitas air, dimana nilai TOM cukup tinggi yang berdampak pada kelimpahan bakteri >10^5 kol/ml.

Hasil uji virus pada sampel benih ikan konsumsi tidak ditemukan hasil positif. Hal ini diduga karena sampel ikan yang mengalami kematian memang tidak terinfeksi oleh *Iridovirus* maupun VNN..

Gambar 5. Pemeriksaan Sampel Laboratorium Keskanling BPBL Ambon

Rencana aksi dalam upaya pencapaian target pengujian sampel adalah meningkatkan sarana pelayanan pengujian serta melakukan kunjungan langsung ke kawasan kawasan budidaya yang teridentifikasi terjadi adanya kejadian penyakit

ikan, sehingga sampel yang diperoleh dapat diiujikan dan dijadikan informasi yang memadai bagi penanggulan HPI di suatu kawasan budidaya perikanan.

IKU 5 : Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)

Isu Resistensi Antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) telah menjadi perhatian semua pihak baik di lingkup kesehatan manusia, lingkungan, perikanan maupun peternakan. Untuk merespon ancaman AMR tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui UPTnya mengimplemantasikan rencana aksi nasional yang telah disusun bersama kementerian kesehatan sebagai upaya untuk memastikan bahwa produk akuakultur khususnya komoditas ikan konsumsi telah memenuhi prinsip keamanan pangan sehingga menjamin kesehatan masyarakat.

Kegiatan surveilans dan pengujian Antibiotic Microbial Resistance (AMR) bertujuan untuk memantau jenis, jumlah, distribusi, tepat atau tidaknya antimikroba yang dipergunakan untuk penanganan penyakit ikan dalam perikanan budidaya. Selain itu memantau kejadian resistensi bakteri patogen pada ikan terhadap antimikroba tertentu. Data hasil surveilan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan terhadap penggunaan antibakteri pada bidang perikanan.

Tabel 9. Capaian IKU "Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)"

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
4	9	120	17	9	52,94	100%

Lokasi surveilans AMR yang dilakukan BPBL Ambon berlokasi pada KJA kelompok pembudidaya di perairan Desa Waiheru, Teluk Ambon Dalam Kota Ambon, Provinsi Maluku dengan sampel ikan dari jenis kerapu, kakap dan kuwe/bubara yang dipelihara oleh pembudidaya.

Hasil surveilans tahun 2025 dilaksanakan di wilayah Maluku khususnya Kota Ambon di area perairan Teluk Ambon Dalam (TAD) dan Teluk Ambon Luar (TAL). Penyempitan lokasi target berkaitan dengan penyesuaian anggaran pengambilan sampel AMR. Pengambilan sampel AMR akan dibagi per triwulan untuk TAD dan TAL. Penurunan target sampel di tahun 2025 menjadi 17 sampel dibanding tahun-tahun sebelumnya berdampak pada penurunan perolehan isolate positif V. *alginolyticus*.

Seperti halnya di tahun 2024, tidak ditemukan isolate positif *V. alginolyticus* pada sampel AMR yang lokasi di perairan Desa Waiheru, Teluk Ambon Dalam. Bakteri yang teridentifikasi dominan dari jenis V. fluvialis. Jenis bakteri ini dapat bertahan pada perairan dengan salinitas yang cukup rendah. Jika dikaitkan dengan lokasi KJA pembudidaya yang berada di sekitar muara sungai, selaras dengan dominasi jenis *V. fluvialis* pada sampel ikan yang diperoleh Di Triwulan I, dari sampel ikan yang di peroleh tidak ditemukan positif bakteri *V. alginolyticus* sehingga tidak diperoleh data sensivitas antimikroba. Sehingga belum dapat disimpulkan tidak adanya penggunaan kedua bahan antimikroba tersebut pada proses budi daya ikan di KJA di perairan desa Waiheru, meski data *Antimricobial Use* (AMU) menyatakan tidak adanya penggunaan bahan antimikroba.

Hingga akhir triwulan pertama tahun 2025, capaian kinerja pada IKU pengujian sampel AMR telah melebihi target triwulan yang ditetapkan. Capaian realisasi terhadap jumlah sampel AMR yang di uji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon sudah mencapai 9 sampel yang melebihi dari target triwulan I sebesar 4 sampel uji.

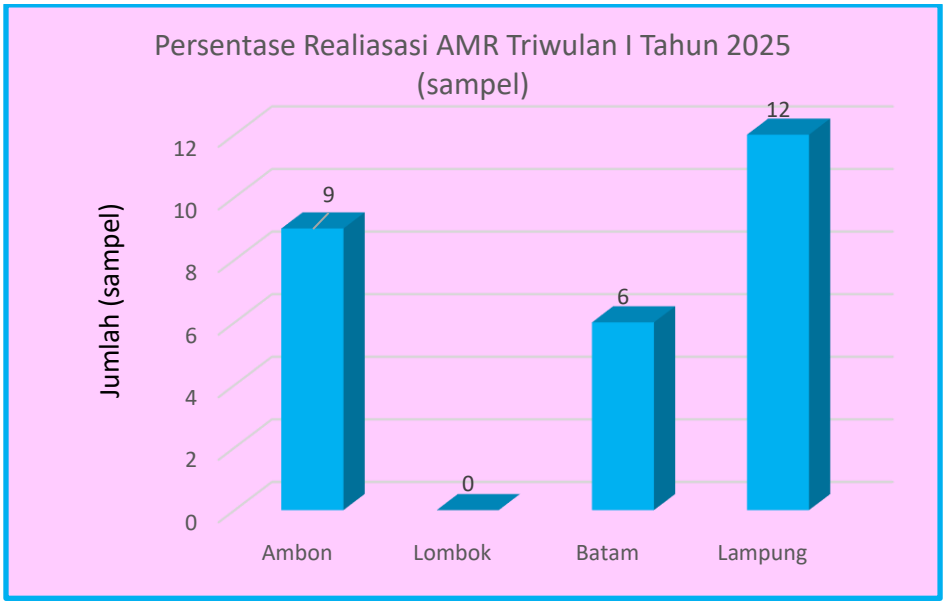

Grafik 7. Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut

Rencana aksi dalam upaya pencapaian target pengujian sampel AMR adalah meningkatkan sarana pelayanan pengujian serta melakukan kunjungan langsung ke kawasan kawasan budidaya yang teridentifikasi terjadi adanya kejadian penyakit ikan, sehingga sampel yang diperoleh dapat diiujikan dan dijadikan informasi yang memadai bagi penanggulan HPI di suatu kawasan budidaya perikanan.

IKU 6 : Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)

Diseminasi teknologi merupakan suatu proses penyebaran teknologi kepada pengguna, sehingga teknologi yang dihasilkan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian, diseminasi teknologi tidak dapat dipisahkan dari penelitian dan pengkajian pertanian. Secara sederhana di lingkup kerja masing-masing, dapat dipertanyakan manfaat teknologi pertanian yang proses perakitannya telah menelan banyak biaya. Besar kecilnya manfaat tersebut tidak dapat dilepaskan dengan diseminasi paket teknologi.

Dalam suatu keadaan, suatu perubahan yang kecil dan sederhana dalam budidaya perikanan mungkin merupakan tindakan paling strategis dalam menghilangkan berbagai hambatan serta dalam meletakkan landasan bagi pembangunan. Suatu diseminasi teknologi perikanan budidaya dilakukan secara bertahap, maka jumlah teknologi yang didiseminasikan harus terbatas. Kalau

jumlah teknologi terbatas, pembudidaya dapat memilih teknologi yang mampu menggabungkan antara kesederhanaan dan risiko yang rendah dengan tambahan produksi yang cukup berarti. Dengan cara demikian akan dicapai tingkat keberhasilan kegiatan diseminasi yang tinggi dan secara otomatis akan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Tabel 10. Capaian IKU "Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)"

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	400	0	0	0

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya antara lain melalui koordinasi intensif dengan TA Anggota Komisi IV DPR RI di wilayah kerja terkait pelaksanaan kegiatan bimtek bagi pembudidaya di wilayah konstituen, sehingga proses diseminasi infomasi teknologi budidaya dapat tersampaikan secara efektif.

SASARAN KEGIATAN III : TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA RUMPUT LAUT

IKU 7 : Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)

Program bantuan sarana dan prasarana kebun bibit rumput laut kultur jaringan menjadi salah satu program prioritas Ditjen Perikanan Budidaya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program ini adalah IKU Ditjen Perikanan Budidaya yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan budidaya khususnya produksi rumput laut. Target atas IKU ini adalah 38 paket bantuan kebun bibit rumput laut.

Perkembangan usaha budidaya rumput laut harus diimbangi dengan adanya ketersediaan bibit yang cukup dan berkualitas baik dan hal ini menjadi permasalahan dalam pengembangan budidaya rumput laut. Peningkatan produksi

rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan, baik secara kualitas maupun kuantitas serta sarana budidaya rumput laut yang memadai.

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya merupakan suatu komitmen yang menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Tabel 11. Capaian IKU "Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)"

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut						
Nama Indikator : Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	72	0	0	

Rencana aksi yang akan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan melakukan identifikasi calon penerima bantuan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis agar bantuan dapat memberikan hasil yang optimal dan memenuhi petunjuk teknis yang berlaku.

IKU 8 : Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)

Rumput laut Kotoni adalah salah satu komoditas unggulan dibidang perikanan dan kelautan Indonesia karena jenis rumput laut ini menghasilkan karagenan yang bernilai ekonomis tinggi. Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid dari polisakarida rantai panjang yang diperoleh dari hasil ektraksi rumput laut dengan menggunakan air panas atau larutan alkali pada temperature tinggi. Rumput laut penghasil karagenan disebut rumput laut karaginofit, yang terdiri dari jenis *Kappaphycus* sp, *Euchema* sp, *Chondrus* sp, *Hypnea* sp dan *Gigartina* sp. Dalam industry dan perdagangan, karagenan memberikan manfaat antara lain dalam industri farmasi, makanan, dan kosmetik sebagai stabilizer, bahan pengental (thickener), pembentuk gel (gelling agent) dan pengemulsi, (Parenrengi et.al. 2011).

Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan. Pada saat ini pengadaan bibit rumput laut masih mengalami

banyak kendala diantaranya iklim laut yang tidak bisa dikendalikan. Pada musim tertentu kondisi perairan tidak cocok untuk pertumbuhan rumput laut sehingga semuanya mati atau tidak tumbuh secara optimal, sehingga pada musim tanam berikutnya menyebabkan ketersediaan bibit sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Hal ini menyebabkan penyediaan bibit secara berkesinambungan untuk peningkatan luas area budidaya belum dapat terpenuhi.

Penyediaan bibit unggul rumput laut telah dilakukan dengan cara seleksi rumpun yang memiliki laju pertumbuhan harian tinggi pada beberapa generasi penanaman, (Masak et al.2011). Bibit seleksi kemudian diperbanyak dengan metode stek kemudian disebar ke pembudidaya rumput laut. Produktifitas penyediaan bibit unggul dengan metode stek ini belum dapat memenuhi kebutuhan pembudidaya rumput laut yang diperkirakan mencapai 1-2 juta ton per tahun.

Kultur jaringan merupakan Teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas serta menumbuhkan bagian bagian tersebut dalam media buatan secara aseptic dalam wadah tertutup sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap.

Bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan mempunyai beberapa keunggulan antara lain :

- Memiliki sifat identic dengan induknya
- Tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas
- Mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar
- Kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin
- Pada rumput laut, produksi bibit dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa dipengaruhi musim.

Teknik embryogenesis somatic pada rumput laut adalah Teknik mengubah sel somatic dari talus menjadi sel embrio bipolar atau dalam rumput laut disebut sel carpospore. Teknik ini dilakukan dengan menginduksi tumbuhnya kalus dari potongan talus, kalus adalah sekelompok sel yang tumbuh tidak berdiferensiasi, sel sel kalus yang terbentuk diregenerasikan menjadi kalus embriogenik yang selanjutnya sel embrio somatic ini diregenerasikan menjadi mikropropagul kemudian menjadi planlet siap diaklimatisasi.

Tabel 12. Capaian IKU "Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)"

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut						
Nama Indikator : Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
500	500	100	10.124	500	4,94	92,61%

Gambar 6 . Produksi Planlet Rumput Laut

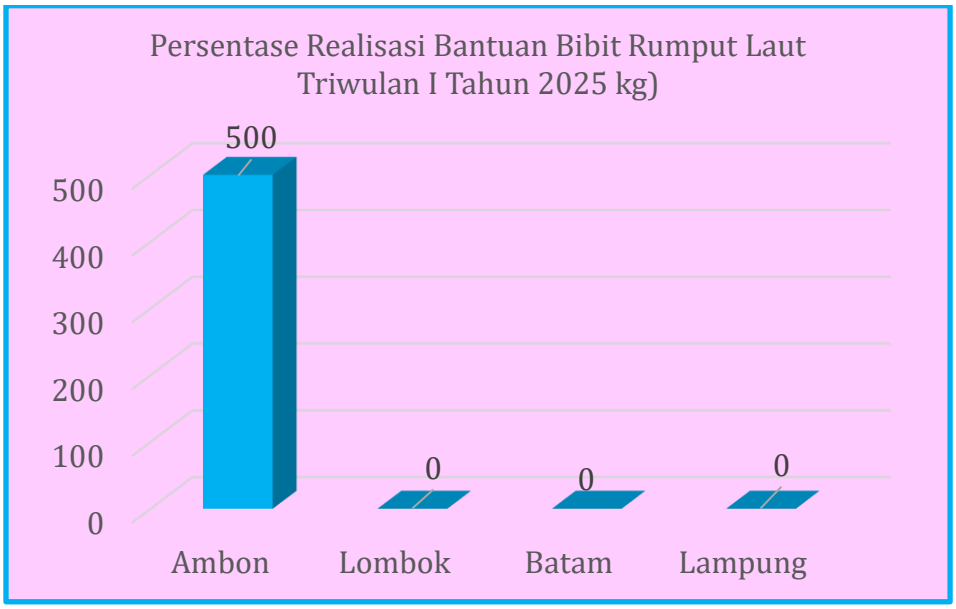

Grafik 8. Capaian IKU Produksi Bibit Rumput Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Produksi planlet rumput laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Lombok dan Batam pada tahun 2025 belum terealisasi. Data tersebut menunjukan setiap satker dalam tahapan produksi planlet rumput laut berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan tata kelola yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu lokasi perairan memiliki karakteristik tersendiri dalam menunjang pertumbuhan rumput laut seperti tingkat pertumbuhan, respon kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi bibit rumput laut antara lain melalui peningkatan jumlah sarana kultur yang mengalami kerusakan, diharapkan di awal musim tanam kegiatan perbanyakan rumput laut dapat berjalan dengan baik dan dapat ditingkatkan sehingga produksi bibit rumput laut kultur jaringan. Dilakukan perbaikan metode pemeliharaan bibit terutama bibit yang baru dihasilkan dari laboratorium kultur jaringan dengan metode modifikasi floating bottle untuk mengurangi potensi kerusakan/kematian bibit.

Koordinasi juga dilakukan dengan pihak terkait sehingga bantuan bibit rumput laut dapat berjalan tepat waktu dan sesuai target yang telah ditetapkan.

SASARAN KEGIATAN IV : TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK

IKU 9 : Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)

AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Yang melatar belakangi penyusunan AKIP adalah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tabel 13. Capaian IKU "Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	84	0	0	0

Progress pencapaian IKU ini pada tahun 2025 mencakup:

1. Laporan Kinerja Triwulanan
2. Rencana Aksi Triwulanan
3. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan
4. Rincian Target IKU tahun 2025
5. Perjanjian Kinerja tahun 2025
6. Renja
7. Manual IKU

Dalam proses pencapaian IKU ini belum ada penggunaan anggaran secara khusus, proses difokuskan dalam pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam evaluasi SAKIP dan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan : (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

IKU 10 : Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan budidaya, salah satu pendorong utamanya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional. Di samping itu, SDM juga merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, kompeten, serta memiliki daya saing tinggi dalam era globalisasi. Oleh sebab itu, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budi Daya yang kompeten dan profesional.

SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Pengangkatan seorang pegawai di dalam jabatan struktural diharapkan sesuai dengan kompetensinya sehingga prinsip the right man and the right place dapat terpenuhi. Hal ini dapat dicapai apabila pengangkatan dalam jabatan struktural berpedoman pada Standar Kompetensi Manajerial (SKM), dimana SKM menggambarkan jenis dan level kompetensi yang diperlukan bagi suatu jabatan, sehingga pelaksanaan tugas suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan agregasi dari indeks kompetensi (membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/assessment dari asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMENSJ/2014), persentase capaian output SKP, persentase tingkat kehadiran dan kepatuhan pejabat terhadap LHKPN/LHKASN, serta data tambahan berupa persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan nilai Human Capital Development Plan (HCDP).

Tabel 14. Capaian IKU "Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	81	0	0	0

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;

4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Bimbingan Teknis memiliki pengertian sebagai sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Seiring dengan jaman yang terus berkembang, Bimbingan Teknis atau Bimtek memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa tujuan dari Bimbingan Teknis Secara Umum, meliputi Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia, Koordinasi yang lebih baik, Peningkatan kinerja institusi dan organisasi untuk menunjang keberhasilan suatu institusi, Memiliki kompetensi untuk secara optimal melaksanakan tugas jabatan yang didudukidan Memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.

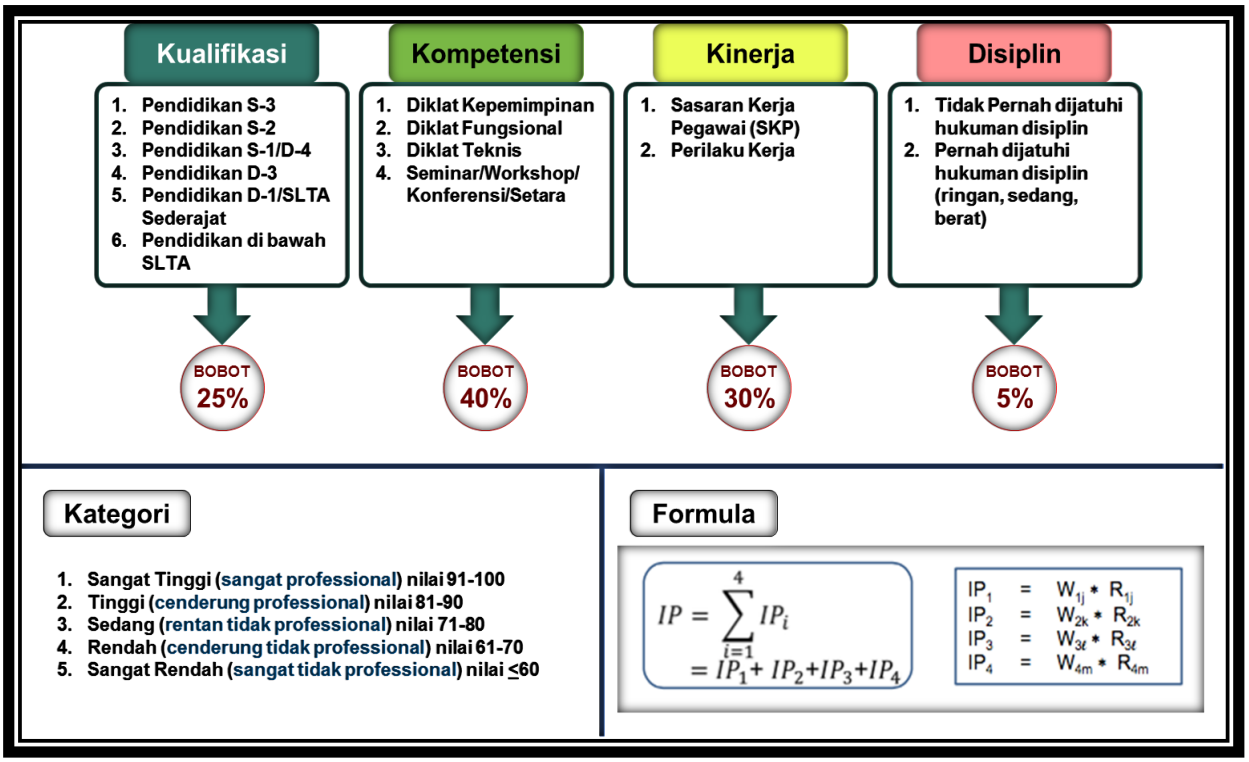

Gambar 7. Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Dalam proses pencapaian target IKU IP ASN, dukungan anggaran tidak dialokasikan secara khusus, karena pada saat ini peningkatan IP ASN dapat dilakukan secara daring seperti Bimtek, Seminar maupun Workshop melalui zoom meeting. Perhitungan IKU IP ASN ini dilakukan setiap semester.

Capaian IKU ini dihitung tiap semester. Belum ditemukan permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini, karena kegiatan peningkatan kompetensi pegawai saat ini dapat dipenuhi dari kegiatan kegiatan bimtek dan sejenisnya secara daring.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai disesuaikan dengan tugas dan jabatannya sehingga indeks profesionalitas dapat ditingkatkan.

IKU 11 : Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)

Menurut pasal 16 UU No. 15/2004, muatan yang termasuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sendiri adalah sebagai berikut:

(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

(2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

(3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

(4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan

Tabel 15. Capaian IKU "Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	100	0	0	0

Dalam proses pencapaian IKU ini belum ada anggaran khusus yang digunakan. Pencapaian IKU ini biasanya dilakukan pada akhir tahun berjalan. Tindak lanjut pelaksanaan IKU ini adalah dengan berupaya melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta menindaklanjuti segala temuan pemeriksaan dengan data dukung yang memadai.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

IKU 12 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah kerja PKA meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan analisa data/bukti audit sesuai teknik audit, pengembangan temuan audit. Adapun proses pelaksanaan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan bukti audit
- Pengujian bukti audit
- Kertas kerja audit
- Penyusunan dan temuan audit

Temuan audit adalah masalah masalah penting serta memiliki dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan audit harus mengandung unsur temuan yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi sebenarnya, kriteria

yang harus dipatuhi oleh auditor, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat.

Temuan audit harus mendapatkan tanggapan dari pihak auditi.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil audit yaitu:

- Judul, mencerminkan uraian substansi temuan
- Informasi, masukan informasi yang penting dan relevan dengan temuan
- Obyektif, yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan
- Kenali pendapat penting
- Yakin
- Kalimat konstruktif, bersifat membangun dan tidak kualitatif serta untuk perbaikan dimasa datang
- Pengakuan, apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen
- Jujur
- Pengendalian manajemen, utamakan pembahasan pengendalian manajemen disetiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan
- Pengaruh negative, jelaskan pengaruh negative yang sudah terjadi
- Penyebab hakiki, tunjukan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya masalah
- Ringkas, uraian permasalahan singkat dan jelas
- Bahasa sederhana.

Tabel 16. Capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
85	92,86	109,25	85	92,86	109,25	91,04%

Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun hasil capaian IKU Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Ambon pada triwulan pertama sebesar 92,86% rekomendasi itjen telah terselesaikan rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh satker. Dalam lima tahun terakhir BPBL Ambon telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan maksimal.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

IKU 13 : Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan langkah pertama dalam mewujudkan suatu system pemerintahan atau organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan reformasi birokrasi ini tidak lain adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat secara tepat, cepat dan efisien, namun pada saat pelaksanaanya sering ditemukan beberapa kendala seperti penyalahgunaan wewenang, adanya indikasi KKN dan masih lemahnya fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Grand design reformasi birokrasi tertuang pada Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 yang menjelaskan tiga sasaran utama yakni peningkatan kapasitas, akuntabilitas organisasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Untuk membantu mewujudkan tiga sasaran tersebut maka diperlukan suatu project kongkret melalui pembangunan zona integritas di setiap instansi.

Zona Integritas menurut Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi

birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan public. Sedangkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system managemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system managemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas layanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang berintegritas, khususnya di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien.

Tabel 17. Capaian IKU "Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	76	0	0	0

Pencapaian target ini telah dicapai pada tahun 2021, dimana BPBL Ambon telah mendapat predikat unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai perolehan 83,14. Pada tahun 2025 akan dilakukan assessment penilaian ulang dari kegiatan zona integritas di BPBL Ambon. Progress kegiatan dalam mempertahankan predikat tersebut adalah:

- Pendokumentasian kegiatan perencanaan
- Pendokumentasian kegiatan akuntabilitas kinerja

- Pendokumentasian manajemen SDM
- Pendokumentasian sistem pengawasan
- Pendokumentasian kegiatan pelayanan publik

Capaian IKU ini dilakukan pada akhir tahun. Belum ditemukan permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini, karena kegiatan penilaian WBK saat ini bisa dipenuhi dari kegiatan pemenuhan dokumen pengungkit dan unsur persepsi masyarakat yang menjadi stakeholder Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan zona integritas dimana pemenuhan dokumen di 6 unsur penguatan serta persepsi anti korupsi dapat diperoleh dengan baik.

IKU 14 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Pagu Anggaran Belanja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 24.830.270.000.

Tabel 18. Capaian IKU "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	92	0	0	0

Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian *output* anggaran melalui : (i) Kelancaran pelaksanaan anggaran *(pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak,*

penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (ii) Mendukung manajemen kas *(pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D)*; dan (iii) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) *(penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).*

Perhitungan IKU IKPA tahun 2025 dilakukan per semester, belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun hasil capaian IKU Nilai Pelaksanaan Kinerja Anggaran menunjukan nilai perolehan yang berkaitan dengan perencanaan pencairan anggaran dalam menunjang ketercapaian output kinerja. Triwulan pertama ini Balai Laut lingkup DJPB menunjukan perolehan nilai IKPA diatas Target yang ditetapkan yang artinya semua inputan pada komponen penilaian telah memenuhi nilai minimal yang ditetapkan.

Tindak lanjut dari pelaksanaan IKU ini adalah penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian *output* yang benar-benar optimal.

IKU 15 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi

a. Capaian Keluaran. Pengukuran capaian keluaran output program dilakukan menghitung rata rata ukur secara geometric (∏) perbandingan antara realisasi indikator dengan target indikator.
b. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi

anggaran keluaran dengan penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Tabel 19. Capaian IKU "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	71,5	0	0	0

Proses pencapaian kinerja perencanaan anggaran dilakukan pada akhir tahun berjalan. Walaupun belum ada penggunanaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini. Data kinerja anggaran BPBL Ambon mengacu pada perhitungan di tingkat eselon I. Data yang dimuat merupakan data adopsi langsung pada aplikasi Smartkeu.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan anggaran dimana pemenuhan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran guna pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dilaksanakan secara efektif dan efissien.

IKU 16 : Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)

Administrasi kepegawaian negara adalah pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Dapat juga dikatakan, administrasi kepegawaian negara merupakan proses penyelengaraaan politik kepegawaian atau program kerja, dan tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi kepegawaian dalam instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan. Lingkup kegiatan administrasi kepegawaian, antara lain meliputi penerimaan, penempatan, pengembangan, dan

pemberhentian tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tupoksi dari pengelola kepegawaian:

1. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
2. Membuat Daftar Absen dan Rekap
3. Menyusun Acara pelantikan Sumpah Jabatan.
4. Mengusulkan kenaikan Pangkat dan Jabatan.
5. Mengusulkan pensiun Pegawai / Janda.
6. Menyusun DUK PNS dan Bezeting.
7. Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
8. Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
9. Membuat Surat Kenaikan Gaji Berkala.
10. Membuat BA. Sumpah Pejabat Fungsional/Pejabat Struktural/PNS.
11. Membuat KP4 Pegawai.
12. Membuat daftar Nominatif Pegawai.
13. Mengetik Surat Keluar/SKP Pegawai/Surat Tugas.
14. Memberikan laporan kegiatan kepada atasan.

Tabel 20. Capaian IKU "Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	3	0	0	0

Pencapaian dan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun 2025. Belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan pengelolaan kepegawaian berdasarkan aturan yang berlaku. Rencana aksi dalam proses pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan validasi data kepegawaian secara berkala dan dilaporkan secara berjenjang kepada SDMAO Eselon 1.

IKU 17 : Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)

Media Relations menurut Dian Wardhani (2008:1) adalah aktivitas komunikasi public relations/humas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian serta dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan balance (berimbang). Adapun pendapat Lesly dalam Yosal (2011:29) mengatakan media relations sangat berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Dengan itu sebuah instansi harus memiliki hubungan media relations yang baik agar mendapat pemberitaan yang baik untuk instansinya.

Perkembangan media massa yang sangat pesat ini mempengaruhi kegiatan media relations yang dijalankan oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Adapun kegiatan yang dilakukan Public Relations Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain mengamati perkembangan media, target sasaran, dan isu – isu yang berkembang di masyarakat agar dapat menentukan strategi media relations yang tepat untuk organisasinya.

Menurut standar analisis humas pada media tradisional yang dikeluarkan Institute for Public Relations (2012) Tone berita adalah penilaian yang dilakukan setelah membaca keseluruhan artikel (Eisenmann, 2012). Menurut Stacks (2006), tone mengukur apa yang dirasakan oleh target audiens tentang individu, perusahaan, produk atau topik, setelah membaca/melihat/mendengar berita di media massa. Tone biasanya terbagi atas positif, netral/balanced, dan negatif. Berikut indikator penentuan sebuah tone (Eisenmann, 2012):

Tabel 21. Deskripsi Tone Berita

No.	Tone Pemberitaan	Deskripsi
1.	Positif	Peliputan media membuat pembaca mendukung, merekomendasikan, dan/atau bersedia bekerjasama dengan perusahaan/brand
2.	Netral	Peliputan media tidak mengandung sentimen tertentu, hanya melaporkan fakta yang ada. Dalam pemberitaan yang negatif,

		sebuah artikel bisa saja netral jika hanya menyuguhkan fakta tanpa ada komentar editorial. Jika perusahaan/brand berada dalam kondisi yang tidak baik, paling tidak perusahaan/brand berupaya mendapatkan peliputan yang netral.
3.	Negatif	Peliputan media membuat pembaca tidak mau mendukung dan bekerjasama dengan perusahaan/brand.
4.	Balanced (Berimbang)	Hasil dari tone secara keseluruhan adalah berimbang.

Tabel 22. Capaian IKU "Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
86	100	116,26	86	100	116,26	100

Proses pencapaian rasio pemberitaan dilakukan setiap triwulan berjalan dengan target 86% dan pencapaian IKU ini pada triwulan I tahun 2025 adalah 100% dimana pemberitaan sub sector perikanan budidaya memiliki tendensi positif. Walaupun belum ada penggunanaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan monitoring media dan mengklasifikasikan berdasarkan tendensi isu yang terjadi.

Capaian di triwulan peraman tahun 2025 dibandingkan dengan capaian di triwulan pertama tahun 2024 adalah sama yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa adanya konsistensi dalam menjalankan IKU tersebut.

IKU 18 : Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pemerintah dan badan

publik. Menurut para pakar, hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, informasi publik adalah kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, termasuk pemerintahan, lembaga publik, dan badan publik lainnya. Informasi publik mencakup berbagai jenis informasi yang wajib diungkapkan, seperti informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan, kinerja, keuangan, dan kegiatan badan publik.

Tabel 23. Deskripsi Jenis Informasi Publik

No.	Jenis Informasi	Deskripsi
1.	Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Informasi ini meliputi informasi tentang profil badan publik, program dan kegiatan, peraturan, keputusan, kebijakan, laporan kinerja, dan laporan keuangan
2.	Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta	Informasi ini adalah informasi yang apabila tidak segera disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Contohnya informasi tentang bencana, keadaan darurat, atau situasi yang bersifat urgensi.
3.	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	Informasi ini adalah informasi yang sudah dikuasai dan didokumentasikan oleh badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat atas permintaan.
4.	Informasi Yang Dikecualikan	• **Rahasia Negara,** Informasi yang menyangkut pertahanan, keamanan, dan ketahanan ekonomi. • **Rahasia Pribadi:** Informasi tentang data pribadi seseorang yang tidak dapat diakses tanpa izin. • **Rahasia Bisnis:** Informasi yang bersifat rahasia dan dapat merugikan persaingan usaha yang sehat. • **Informasi yang Belum Dipastikan Kebenarannya:** Informasi yang masih dalam proses pemeriksaan atau penyelidikan.

Tabel 24. Capaian IKU "Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	80	0	0	0

Regulasi yang mengatur keterbukaan informasi public lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Indikator ini merupakan salah satu indicator baru dalam perjanjian kinerja 2025, memiliki target sebesar 80 dan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Beberapa tantangan dalam proses implementasi keterbukaan informasi publik adalah :

- Masih terdapat kendala dalam pemahaman masyarakat mengenai UU KIP.
- Beberapa badan publik mungkin belum sepenuhnya siap untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi secara efektif.
- Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan petugas PPID mengenai hak dan kewajiban dalam keterbukaan informasi. - Keterbukaan informasi publik juga berperan dalam mendorong inovasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik untuk masalah sosial.
- Selain itu, keterbukaan informasi dapat membantu mengurangi KKN dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran dan sumber daya publik.
- Dalam konteks global, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks demokrasi suatu negara, di mana negara yang lebih terbuka cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi.

- Untuk mencapai tujuan keterbukaan informasi, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan transparan. - Selain itu, penting untuk membangun infrastruktur teknologi yang mendukung aksesibilitas informasi, seperti portal informasi publik yang user-friendly.
- Penggunaan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi publik secara lebih luas dan cepat.
- Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan publik dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah.
- Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan yang diterapkan.
- Keterbukaan informasi juga dapat mendorong inovasi dalam pelayanan publik, di mana masyarakat dapat memberikan ide-ide baru yang dapat diterapkan oleh pemerintah.
- Dalam jangka panjang, keterbukaan informasi publik diharapkan dapat menciptakan budaya transparansi yang berkelanjutan dalam pemerintahan dan masyarakat. - Hal ini akan memperkuat demokrasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial.
- Keterbukaan informasi juga dapat meningkatkan daya saing suatu negara di kancah internasional, karena negara yang transparan cenderung lebih menarik bagi investor.
- Selain itu, keterbukaan informasi publik dapat membantu dalam penanganan isu-isu krusial seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan pendidikan, di mana partisipasi masyarakat sangat diperlukan.
- Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif.
- Keterbukaan informasi juga berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat, di mana mereka dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan kualitas hidup.

Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat umum.

- Upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi harus melibatkan pelatihan bagi petugas publik agar mereka dapat menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan informatif. Selain itu, perlu ada mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saran terkait informasi yang disediakan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari tata kelola yang baik dan partisipasi aktif masyarakat.

IKU 19 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip sangat penting dalam pengamanan aset Institusi dan sebagai bahan pembuktian baik secara *de facto* maupun/ *de jure.*

Output tindak lanjut pengawasan arsip adalah melahirkan pengelolaan arsip baik secara fisik, isi informasi utuh dan terkoneksi secara online. Pengelolaan secara fisik dan elektronik perlu dilakukan secara komprehensif. Pengelolaan arsip butuh komitmen dari pimpinan & konsistensi pelaksana. Tindak lanjut adalah perlu sinergi & sinkronisasi dalam pengelolaan arsip daalm tingkat teknis diantara perlunya bintek-bintek pemberkasan.

Dalam pengelolaan Arsip Dinamis membutuhkan SDM, Sarana & Prasarana, dan sumber daya lain. Empat pilar pengelolaan arsip dinamis yang harus dilakukan organisasi kerja yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, JRA, Sistem Klasifikasi Keamanan.

Tabel 25. Capaian IKU "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	70	0	0	0

Capaian IKU ini akan dihitung di akhir tahun 2025. Belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan pengelolaan kearsipan dan mengklasifikasikan arsip berdasarkan jenis dan kebutuhan arsip.

IKU 20 : Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Tujuan utama budidaya perikanan adalah memproduksi biota akuatik untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, terutama protein, dan bukan pangan.

Kendala Budidaya Ikan antara lain :

- Mahalnya harga pakan.
- Susahnya Ketersedian benih yang berkualitas.
- Besarnya biaya pembuatan kolam.
- Waktu pengontrolan setiap saat.
- Pemberian pakan harus tepat waktu.
- Susah untuk beradaptasi dengan lingkungan.
- Tidak semua species ikan bisa dibudidayakan.

Kartu KUSUKA merupakan kartu identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Yang berhak memiliki kartu ini mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan hingga petambak garam.

Adapun fungsi dari dari kartu KUSUKA ini antara lain sebagai integrasi dari semua kartu identitas Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di KKP menjadi satu Kartu, integrasi satu data stakeholder KKP yang dapat digunakan lintas esselon, pemanfaatan data dengan Kementerian atau Lembaga lain, prasyarat calon penerima bantuan

Selain menjadi identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan, Kartu KUSUKA juga berfungsi sebagai basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Tak hanya itu, tapi juga pelayanan, pembinaan, serta sarana pemantauan evaluasi pelaksanaan program KKP.

Tabel 26. Capaian IKU "Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	80	0	0	0

Capaian dan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun sebesar 96,36. Belum ada penggunanaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan proses pendataan pelaku usaha budidaya yang merupakan calon penerima bantuan prioritas tahun 2025, berdasarkan petunjuk teknis bantuan setiap anggota atau kelompok telah terdaftar atau teregistrasi dengan kartu KUSUKA.

Rencana aksi dalam proses pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan dan Dinas KP setempat terkait usulan pelaku usaha budidaya ikan harus memiliki akses KUSUKA, sehingga diharapkan setiap kelompok penerima bantuan dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah terintegrasi dengan KUSUKA KKP. Capaian IKU ini di tahun 2025 dihitung di akhir tahun .

IKU 21 : Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan atau proses tertentu. SOP bertujuan untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 27. Capaian IKU "Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)"

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan I Tahun 2025			Tahun 2025			
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	% Capaian	Perbandingan Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024
0	0	0	65	0	0	0

Definisi SOP adalah dokumen yang menjelaskan cara melakukan suatu aktivitas atau proses dengan cara yang terstandarisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan atau panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan tugas tertentu, yang bertujuan untuk mengurangi variasi dalam pelaksanaan dan meningkatkan efisiensi.

Tujuan SOP adalah SOP membantu memastikan bahwa setiap individu yang melakukan tugas yang sama mengikuti langkah-langkah yang sama, sehingga hasilnya konsisten, Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, kualitas produk atau layanan dapat terjaga, SOP berfungsi sebagai alat pelatihan bagi karyawan baru, memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana melakukan tugas mereka. SOP menetapkan tanggung jawab dan peran setiap individu dalam proses, sehingga memudahkan dalam penilaian kinerja, dan Dalam banyak industri, SOP diperlukan untuk memenuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh badan pengawas.

Indikator kinerja ini merupakan IKM baru pada perjanjian kinerja 2025 dengan target sebesar 65% dan perhitungan IKM ini dilakukan pada akhir tahun.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN 2025 pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah sebesar Rp 24.830.270.000 Berdasarkan data dari *Online Monitoring* Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) tahun 2025, realisasi anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai bulan Maret 2025 telah tercapai sebesar Rp. 4.277.949.159 atau sebesar (17,23%). Pembagian alokasi pagu anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tersebut menurut jenis belanja

yaitu: (i) Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.297.320.438 (ii) Belanja Barang sebesar Rp 1.980.628.721; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp 0.

Tabel 28. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja Tahun 2025 dan 2024

JENIS BELANJA	TRIWULAN I TAHUN 2025			TRIWULAN I TAHUN 2024		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pegawai	9.385.610.000	2.297.320.438	24,48	9.253.840.000	2.081.752.762	22,50
Barang	15.179.660.000	1.980.628.721	13,05	22.781.151.000	4.787.109.084	20,93
Modal	265.000.000	0	0	1.600.000.000	63.216.000	3,95
Total	**24.830.270.000**	**4.277.949.159**	**17,23**	**33.724.991.000**	**6.932.077.846**	**20,55**

Persentase anggaran belanja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2025 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Barang.

Penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ditujukan untuk memenuhi target beberapa program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi utama. Pada tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memiliki beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh anggaran yang memadai. Berikut adalah sasaran strategis dan indikator kinerja utama beserta dukungan anggaran:

Tabel 29. Data realisasi anggaran pada Indkator Kinerja Utama (IKU) program prioritas Triwulan I tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran TW I	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	11 unit	958.000.000	0	
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	1.142 ekor	305.968.000	305.968.000	Capaian 100%
		Benih Ikan AIr Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	423.586 ekor	1.329.391.000	705.186.204	Capaian 53,05%

		Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	309 sampel	69.414.000	0	
		Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17 sampel	15.538.000	0	
		Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	400 orang	160.000.000	0	
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	72 unit	1.081.300.000	0	Capaian 0%
		Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	10.124 kg	222.520.000	84.818.000	Capaian 38,12 %
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84	Belum ada Penganggaran khusus		
		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81	Belum ada Penganggaran khusus		
		Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)	100%	Belum ada Penganggaran khusus		
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	85%	Belum ada Penganggaran khusus		
		Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	76	Belum ada Penganggaran khusus		
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92	Belum ada Penganggaran khusus		
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	71,5	Belum ada Penganggaran khusus		
		Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	3	Belum ada Penganggaran khusus		
		Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang	≥86%	Belum ada Penganggaran khusus		

		Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)				
		Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	≥80	Belum ada Penganggaran khusus		
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	70%	Belum ada Penganggaran khusus		
		Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	80%	Belum ada Penganggaran khusus		
		Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)	65%	Belum ada Penganggaran khusus		

3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran

Berikut adalah uraian tentang evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang telah direalisasikan serta analisis capaian kinerja dari sasaran strategis. Pencapaian program prioritas Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon merupakan bagian sasaran kegiatan yakni pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dan Terselenggaranya pengendalian dan pegawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Efisiensi merupakan ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu, dan biaya), yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang telah ditetapkan. Akan dikatakan efisien jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam upaya melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah melakukan beberapa upaya dalam pencapaian target kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun secara umum penggunaan anggaran di triwulan pertama tahun 2025 menunjukan selisih cukup kecil antara nilai pagu dan realisasi anggaran.

Upaya – upaya yang telah dilakukan adalah:

- Penggunaan aplikasi media seperti ZoomUs, Google Meet merupakan aplikasi gratis dalam video conference yang dapat diaplikasikan dengan mudah, hal ini biasanya digunakan dalam koordinasi kegiatan prioritas, maupun pelaksanaan seminar, bimtek maupun workshop bagi peningkatan kapasitas SDM BPBL Ambon.
- Melakukan perhitungan secara cermat terhadap kebutuhan bahan pendukung produksi sehingga ketersediaanya mencukupi.

BAB IV
PENUTUP

1.1. Simpulan

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian target kinerja pada tahun 2024 telah mencapai target.

1.2. Permasalahan/Kendala dihadapi

Pada triwulan pertama tahun 2025, belum ada kendala yang berarti dalam proses pencapaian indikator kinerja utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan di awal tahun, disiasati dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kegiatan dan pengaturan sumber daya manusia yang fleksibel dan dengan memperhatikan beban pekerjaan sehingga tidak mempengahui dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Memasuki triwulan kedua akan diperkirakan terjadi peralihan musim yang dapat mempengaruhi kegiatan budidaya terutama di kegiatan budidaya ikan di keramba jaring apung yang sangat dipengaruhi perubahan parameter lingkungan sekitar. masih terdapat sedikit kendala teknis seperti masih ditemukannya sarana filterisasi media yang kurang maksimal yang berdampak pada kurang optimalnya kualitas media pemeliharaan yang siap digunakan dalam proses pemeliharaan ikan, banyaknya serangan ektoparasit dan bakteri, menurunnya kualitas media pemeliharaan dan terjadi blooming protozoa tertentu di perairan akibat perubahan parameter lingkungan secara signifikan namun realisasi bantuan masih dapat memenuhi target.

1.3. Langkah Perbaikan

Beberapa upaya telah dilakukan dalam memenuhi pencapaian target IKU yang menjadi tugas utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Langkah perbaikan yang dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan mengurangi sarana perbenihan ikan laut sebagai langkah efisiensi anggaran dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk memproduksi benih ikan laut.
- Melakukan penempatan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan beban pekerjaan.
- Telah dilakukan perawatan sand filter dan pembersihan sarana filter guna meningkatkan sistem filtrasi media pemeliharaan pada fasilitas produksi.
- Telah mengistruksikan kepada pegawai untuk menjalankan Standar Operasional Prosedur dengan baik dan benar.
- Melakukan pengujian sampel HPI secara berkala pada semua fasilitas budidaya yang dimiliki.
- Melakukan perbaikan sarana dan teknik kultur pakan alami skala massal untuk meminimalisir kegagala dalam kegiatan produksi pakan alami untuk menunjang kegiatan pemeliharaan larva ikan.
- Meningkatkan koordinasi dan promosi kepada stekholder ketersediaan komoditas untuk meningkatkan nilai PNBP balai di waktu kedepan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan pertama ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi BPBL Ambon, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal laporan kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders* /mitra kerja, sehingga kontribusi BPBL Ambon dalam pembangunan perikanan budidaya dapat lebih ditingkatkan.